



JUSTICE UPDATE

Tanggal 8 – 22 Maret, No. 2 / 2004

Pengadilan Distrik Dili

JSMP secara aktif melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili dalam dua minggu terakhir bulan ini. Kegiatan monitoring meliputi berbagai kasus pidana maupun perdata, meskipun kasus pidana mendapat perhatian yang sedikit lebih utama. Pada bagian ini menyorot dua issue penting, yaitu masalah jadwal sidang dan pentingnya papan pengumuman bagi Publik.

- **Jadwal Sidang**

Di Pengadilan Distrik Dili, terdapat dua ruangan secara terpisah dengan staffnya masing-masing yang mengurus masalah administrasi untuk perkara pidana dan perdata. Dari dua unit administrasi inilah setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang , jadwal sidang dan urusan administrasi lain yang relevan.

Meskipun untuk setiap perkara yang akan disidangkan sudah disediakan jadwal oleh unit administrasi pengadilan, tetapi bukan berarti tanpa masalah. JSMP mengidentifikasi bahwa dalam daftar sidang yang disediakan unit administrasi (perdata dan pidana) terdapat pembagian jadwal sidang dengan perbedaan waktu yang tipis antara sidang kasus pidana dan perdata. Misalnya jam sidang antara kasus pidana dan perdata biasanya terdapat selisih tiga puluh menit. Mungkin perbedaan waktu tersebut bukan issue penting dipermasalahakan, tetapi dalam pandangan JSMP perbedaan waktu sidang yang tipis antara satu perkara dengan perkara lain dengan hakim yang sama berpotensi menimbulkan persoalan pelaksanaan waktu sidang yang kurang tepat waktu.

Dalam praktek sering kali terdapat pelaksanaan sidang yang tidak sesuai dengan jadwal persidangan sebagaimana disediakan bagian administrasi. Dalam pantauan JSMP, penundaan jam sidang sebuah perkara biasanya berlangsung hingga satu jam atau lebih antara jadwal yang disidangkan dengan apa terjadi dalam praktek peradilan. Dampaknya tentu besar bagi sistim peradilan peradilan secara umum. Sebuah ilustrasi, seorang yang memiliki kesibukan dalam urusan bisnis jika dipanggil sebagai saksi di pengadilan dengan penundaan waktu yang tidak layak akan merasa dirugikan kepentingannya dan mungkin akan keberatan atau menolak menjadi saksi dimasa datang.

JSMP mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti hakim dan actor pengadilan lain terlambat masuk kantor atau sering menjadi factor mundurnya jam sidang. Keterlambatan tersebut secara umum disebabkan karena para actor pengadilan memiliki/terlibat dalam urusan lain sehingga pelaksanaan jam sidang sering tidak konsisten. Di sisi lain, kasus penundaan sidang yang berlangsung hingga hari atau minggu berikutnya juga sering terjadi dalam praktek peradilan. Dalam sebuah kasus, JSMP mencatat bahwa penundaan sidang terjadi karena pengacara belum siap untuk sidang sesuai dengan agenda persidangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketidaksiapan tersebut disebabkan karena sang pengacara belum membaca dakwaan sehingga tidak mempersiapkan yang cukup untuk sidang dengan agenda yang sudah ditetapkan.

- **Papan Pengumuman**

Ketersediaan papan pengumuman dengan informasi yang memadai akan membantu para pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang layak tentang sidang perkara di pengadilan. Di Pengadilan Distrik Dili, tersedia sebuah papan informasi untuk jadwal sidang, baik untuk kasus perdata maupun pidana. Masalahnya adalah papan informasi tersebut tidak difungsikan secara baik sehingga pengunjung pengadilan sulit untuk mendapatkan dan mengetahui informasi tentang persidangan. JSMP memperoleh informasi dari sejumlah aktor pengadilan yang menyebutkan bahwa masalah waktu dan keterbatasan staff merupakan factor penyebab mengapa informasi persidangan di papan pengumuman tidak berfungsi dengan baik. JSMP berpendapat bahwa ketersediaan papan informasi penting sebagai sarana untuk menyebarkan informasi bagi Publik dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari pengakuan dan penghargaan hak seseorang untuk mendapat informasi atas seluruh proses peradilan sebagai bagian dari hak untuk menerima informasi umum sebagaimana dijamin dalam pasal 40 Konstitusi RDTL dan ayat 2 pasal 19 ICCPR. Karena itu, di masa datang penting untuk membenahi sistim pembagian informasi bagi publik dengan tersediannya informasi yang memadai dalam papan pengumuman atau sistim pembagian informasi kepada publik lainnya. Secara teknis, difungsikannya papan pengumuman dengan informasi yang layak, paling tidak akan membatasi orang untuk keluar masuk ruangan administrasi secara tidak perlu.

Dalam salah satu kasus di Pengadilan Dili District tanggal 9 Maret, pengacara umum mengeluh kepada hakim bahwa dia tidak diberi ijin untuk melihat dakwaan sebelum sidang. Sebuah salinan dakwaan kemudian diberikan kepada pengacara umum pada saat sidang. Dakwaan tersebut dibaca kepada terdakwa tetapi proses selanjutnya tidak bisa dilakukan karena pengacara umum membutuhkan waktu untuk menyiapkan eksepsi. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 17 Maret.

JSMP sudah mengidentifikasi dalam laporan sebelumnya bahwa kadang-kadang para pengacara mempunyai halangan dalam mendapat dokumen-dokumen dari jaksa. Satu hal yang penting, dalam pandangan JSMP, untuk memastikan bahwa para pengacara mempunyai kesempatan untuk melihat dokumen-dokumen terkait supaya ada kesempatan untuk mempersiapkan eksepsi, sehingga persidangan yang ditunda karena alasan bahwa pengacara umum tidak menerima dokumen-dokumen.

Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Berat

Pada hari Selasa, 11 Maret 2004, Abilio Mendes Correia dibebaskan bersyarat Panel Khusus Kejahatan Berat. dua hari sebelumnya Correia dihukum penjara untuk 3 tahun karena disalahkan kejahatan melawan kemanusiaan adalah tindakan inhuman?. Correia sudah ditahan untuk kira kira dua tahun sebelum ada keputusan. Karena dia sudah selesai 2/3 hukum dia elibible untuk bebas bersyarat.

Awal dakwaannya termasuk tiga kejahatan melawan kemanusiaan dia hanya bersalah satu Kejahatan untuk memukul dan penganiayaan Mariano Da Costa di Liquica distrik pada tanggal 9 Agustus 1999.

Pengacara Correia memberi bukti- bukti bahwa kasus yang sama sudah diselesaikan melalui reconciliasi masyarakat yang diadakan oleh CAVR. Dia mengatakan bahwa kasus yang sama dihukum oleh deponents harus mengumumkan bersalah, melakukan tugas untuk masyarakat atau membayar ganti rugi.

Kasus ini memunculkan masalah penting tentang implimentasi praktik tentang alat-alat untuk mencapai keadilan untuk kejadian dalam berada di Timor Leste sejak 1974. Walaupun CAVR dan SCU berdasar perbedaan jelas, dalam praktik beberapa kasus membedakan di antara yang diselesaikan oleh lembaga tidak jelas. Penting sekali untuk keadaan ini diperiksa untuk identifikasi keakibatnya aplikasi keadilan yang berbeda.

JSMP yakin bahwa ada ketidakpastian tergantung apakah ada cara untuk menyuting siding yang harus diselesaikan. Hal ini kurang baik karena ada keputusan dari Special Panel pada minggu mendatang dimana akan lebih cocok untuk proses penyutingan tersebut.

Pengadilan Tinggi

Dua kasus signifikan yang dihadapkan pada pengadilan tinggi. Kedua kasus tersebut tersangka ditahan karena tuduhan terlibat dalam kelompok illegal. Komandante labarik adalah pimpinan combatants group CA/75. dia dituduh memaksa orang untuk membayar sejumlah uang untuk anggota organisasinya, membawa senjata dan seragam serta mengancam akan dihukum jika tidak membayar uang yang dimintakan. Tersangka dituntut melakukan makar, pencurian berat dan subversi sebagaimana diatur dalam KUHP. Pengacara dalam argumentasinya mengatakan tidak ada bukti yang kuat untuk menahan kliennya dan oleh karena itu kliennya harus dibebaskan.

Dalam satu kasus yang berhubungan, tujuh tersangka dituntut melakukan penyerangan, menghina otoritas di depan public dan pemerasan. Tuntutan kepada mereka dengan mendapatkan uang dari kartu identitas untuk organisasi yang dinamakan osenako. Pengacara berargumen itu adalah tidak cukup bukti untuk membenarkan penahanan, khususnya dua kesaksian yang diberikan oleh saksi dari jaksa. Dalam hearing sebelumnya hakim investigasi, saksi-saksi mengatakan bahwa tidak membawa senjata ketika meminta uang dan senjata itu yang dimiliki tersangka yang didapatkan oleh polisi sebagai bukti, yang mana didapatkan dari rumah tersangka dan tidak digunakan untuk insiden tersebut. Maka itu pengacara

berargumen bahwa tidak ada dasar hukum untuk menahan kliennya. Jaksa tidak hadir di pengadilan untuk menanggapi argument tersebut.

Dua kasus tersebut sepantasnya harus dibuktikan dengan penelitian yang cermat karena media yang baru mengindikasikan bahwa pemerintah ingin memberhentikan kegiatan organisasi makar seperti itu. Akibat dari itu sepenuhnya penting untuk memastikan kemandirian judicial dan menjamin bahwa delapan tersangka tersebut tidak dibenarkan untuk ditahan dan menerima pemberlakuan yang adil di pengadilan.

Pengadilan tinggi dijadwalkan untuk membuat keputusan kedua kasus tersebut pada tanggal 23 Maret 2004. JSMP bermaksud untuk melakukan pemantauan yang lebih dekat tentang tuntutan politik dalam kasus tersebut.

Pada sidang ini, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Commandante Labarik harus dibebaskan dengan bersyarat sementara itu ketujuh orang lainnya tetap akan ditahan. JSMP bermaksud untuk memonitor dengan seksama pada kasus-kasus yang secara politik didakwakan dan memberikan analisa kepada keputusan Pengadilan Tinggi tersebut.